

Revitalisasi Pasar Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Firas Bara Abiyan Ruhiyat*, Sri Hidayati Djoeffan

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*firas.bara08@gmail.com

Abstract. The existence of traditional markets is the economic center of society. The dependence of small traders on the existence of traditional markets is very important. Because the Government as a regulator needs to protect and empower it. This policy has been made, among others in the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2012 concerning Management and Empowerment of Traditional Markets. The regulation regulates various aspects so that traditional markets can still be used by consumers as shopping centers to meet their daily needs. The management of traditional markets is still underdeveloped, which makes it difficult to compete with modern markets, which have recently developed quite rapidly, resulting in underdeveloped traditional markets. The purpose of this study is to revitalize the South Tangerang City of Jombang Market in order to improve market services, facilities and infrastructure to support the market. The approach method used is a theoretical approach, comparative approach, descriptive statistical approach and participatory approach. Theoretical approach is carried out by theoretical analysis and standard policy of traditional market structuring, comparative approach is carried out by comparing the traditional markets of Jombang which will be revitalized with markets that have been arranged according to applicable standards, descriptive statistical approach is carried out by collecting and presenting Jombang Traditional Market data used for the basis of market area revitalization, and a participatory approach is carried out with direct field observations to conduct interviews of traders and people who are active in the Jombang Market area to see the activities that occur in the Jombang Market area. The final results of this study are the Jombang Traditional Market revitalization plan and the design of the Jombang Traditional Market design.

Keywords: Trade and Services Sector, Existence of Traditional Markets, Ministerial Regulation No. 20 of 2012, Market Revitalization.

Abstrak. Keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat. Ketergantungan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional sangat penting. Oleh karena Pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Kebijakan ini telah dibuat, antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan pasar tradisional masih belum berkembang sehingga mengakibatkan sulitnya

bersaing dengan pasar modern yang akhir-akhir ini cukup pesat perkembangannya, hal ini mengakibatkan pasar tradisional kurang berkembang. Tujuan penelitian ini untuk melakukan revitalisasi Pasar Jombang Kota Tangerang Selatan guna meningkatkan pelayanan pasar, sarana dan prasarana pendukung pasar. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara teoritis, pendekatan komparatif, pendekatan statistik deskriptif dan pendekatan partisipatif. Pendekatan teoritis dilakukan dengan analisis teori serta kebijakan standar penataan pasar tradisional, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pasar tradisional jombang yang akan direvitalisasi dengan pasar yang sudah tertata sesuai standar yang berlaku, pendekatan statistik deskriptif dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data-data Pasar Tradisional Jombang yang digunakan untuk dasar revitalisasi kawasan pasar, dan pendekatan partisipatif dilakukan dengan observasi langsung lapangan untuk melakukan wawancara para pedagang dan masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan Pasar Jombang guna melihat kegiatan-kegiatan yang terjadi di kawasan Pasar Jombang. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu rencana revitalisasi Pasar Tradisional Jombang serta desain perancangan Pasar Tradisional Jombang.

Kata kunci : Sektor Perdagangan dan Jasa, Keberadaan Pasar Tradisional, Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2012, Revitalisasi Pasar.

1. Pendahuluan

Keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat. Ketergantungan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional sangat penting. Oleh karena Pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Kebijakan ini telah dibuat, antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan kebijakan ini untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan nyaman sebagai pelayan masyarakat serta penggerak roda perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dengan pusat toko dan pasar modern.

Di samping itu pula, kawasan Pasar Jombang sering terjadi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari, lingkungan sangat kumuh (kebersihan tidak terawat seperti sampah, limbah), pedagang tidak teratur, parkir kendaraan yang belum tertata serta tidak adanya tempat untuk kendaraan roda empat, dan masih banyaknya kios-kios/lapak pedagang yang belum tertata. Untuk lebih jelasnya permasalahan di pasar jombang dapat dilihat pada Gambar 1 Kondisi Fisik Pasar Jombang dan Tabel 1 Identifikasi Masalah Pasar Jombang



Gambar 1. Lokasi stasiun curah hujan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Identifikasi Masalah Pasar Jombang

Identifikasi Masalah	Pasar Tradisional Jombang
Degradasi	Keadaan pasar yang kumuh terindikasi dengan

Identifikasi Masalah	Pasar Tradisional Jombang
Visual	keadaan kios/los yang kotor dan tidak tertata dengan baik
	Kurangnya pencahayaan matahari
	Timbulnya aroma tidak sedap karena berdekatan dengan TPS serta banyaknya tumpukan sampah di beberapa tempat
Degradasi Fungsional	Tidak tersedianya RTH
	Tidak tersedianya alat pemadam kebakaran
	Ketidakyamanan fasilitas umum berupa wc umum yang kurang baik dan kumuh
	Kurangnya lahan parkir karena digunakan menjadi lapak para pedagang dan tidak tersedianya lahan parkir untuk kendaraan roda empat
	Bahu jalan yang digunakan untuk menjadi lahan parkir kendaraan bermotor
	Tidak adanya area pedestrian
	Tidak tertatanya kios/los yang ada di Pasar Jombang
Degradasi Lingkungan	Tercemarnya saluran drainase terbuka oleh limbah sampah
	Pengelolaan sampah yang tidak baik sehingga banyak sampah bereserakan di lingkungan pasar dan menyebabkan tercemarnya udara dengan bau sampah
	Koefisien dasar hijau (KDH) kurang dari 30% mengakibatkan miskin resapan dan ruang terbuka hijau

Gambaran kondisi di atas kawasan sekitar Pasar Jombang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi prioritas untuk segera ditangani. Dengan adanya Kajian Penataan Pasar Jombang, diharapkan munculnya alternatif pengendalian pemanfaatan ruang dan tertatanya sekitar Kawasan Pasar Jombang, sehingga tercipta kawasan yang baik untuk kegiatan ekonomi serta nyaman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Dari gambaran di atas pula diketahui telah terjadi degradasi fungsional, visual dan lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan khusus terhadap Pasar Jombang agar tercipta kawasan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seorang planner harus bisa memperbaiki kerusakan lingkungan dengan cara menciptakan perencanaan yang baik sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Maka dari itu kajian ini akan melakukan revitalisasi terhadap Kawasan Pasar Jombang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peningkatan vitalitas pasar jombang untuk mewujudkan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan nyaman?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian

ini adalah untuk revitalisasi kawasan pasar jombang untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar sehingga terciptanya pasar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

2. Landasan Teori

Menurut pengertiannya, pasar merupakan suatu tempat bagi manusia dalam mencari keperluan sehari-harinya (Trisnawati, 1998). Sedangkan menurut Belshaw (dalam Suprpto, 1998) pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur social, ekonomis, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (atau penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan kegiatan tukar menukar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

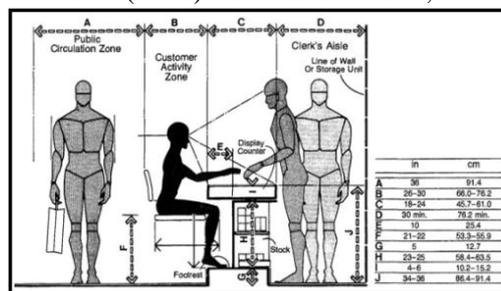
Pasar tradisional adalah pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang tempat usaha sempit, sarana parkir yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik). Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembeliannya dengan sistem tawar menawar. Para pedagangnya sebagian besar adalah golongan ekonomi lemah dan cara berdagangnya kurang profesional (Lubis, 2005).

Kriteria Perancangan Luas Bangunan Perdagangan (Chiara, 1992)

Hubungan antara lebar dan tinggi pasar sangat penting karena kedua unsur tersebut mempunyai pengaruh psikologis yang kuat terhadap pengunjung. Pengaturan panjang, lebar dan tinggi pasar harus mempertimbangkan jarak pandang pengunjung agar terbentuk pasar yang nyaman. Terdapat beberapa elemen di pasar yang telah diatur dimensinya diantaranya yaitu:

1. Koridor

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, koridor di setiap los harus memiliki lebar minimal 1,5 m. Pengaturan dimensi koridor di pasar juga terdapat di teori retail spaces oleh Chiara (1992)[1]. Dapat dilihat pada **Gambar 2**, public circulation zone (A) dan customer activity zone (B) diasumsikan sebagai koridor setiap los di pasar tradisional. Pada gambar, dimensi sirkulasi pergerakan ditetapkan 91,4 cm dimensi customer activity zone ditetapkan antara 66,0 - 76,2 cm. Total dimensi koridor setiap los berdasarkan teori Chiara (1992) ialah minimal 157,4 - 167,6 cm.



Gambar 2. (Sumber : Chiara,dkk) Dimensi Koridor Area Penjualan

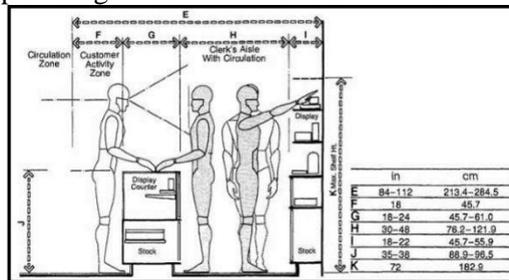
2. Kios

Kios adalah tempat penjual menjual barang dagangan yang biasanya menjual bahan pangan kering dan tempat makan saji. Berdasarkan kriteria pengaturan dimensi kios yang dilihat pada **Gambar 3**, maka diasumsikan bahwa luas kios minimal 167 cm x

238 cm.

3. Lapak

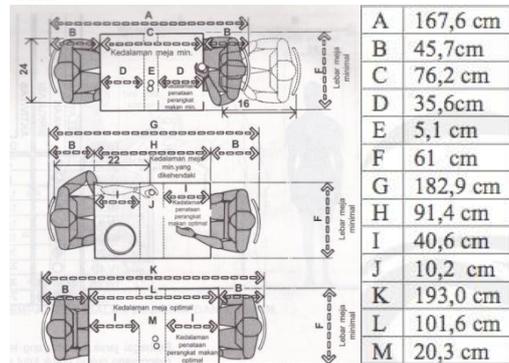
Lapak ialah meja tempat penjualan barang dagangan di pasar tradisional. Pengaturan dimensi lapak juga dijelaskan oleh Chiara dkk (1992) yang dapat dilihat pada **Gambar 3**. Diasumsikan lapak dengan luas minimal 110 cm x 137 cm.



Gambar 3. (Sumber : Chiara,dkk) Dimensi Meja Tempat Penjualan/Lapak

4. Meja Foodcourt

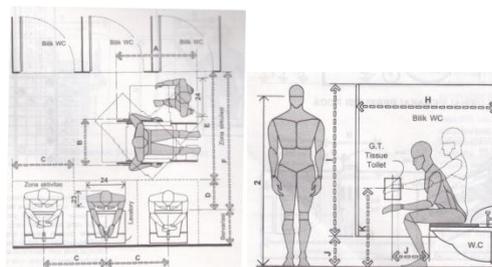
Dilihat dari **Gambar 4**, dapat diasumsikan bahwa meja *foodcourt* minimal lebar 61 cm dan Panjang 167,6 cm.



Gambar 4. (Sumber : Panero, Julius) Dimensi Meja Makan

5. Toilet Umum

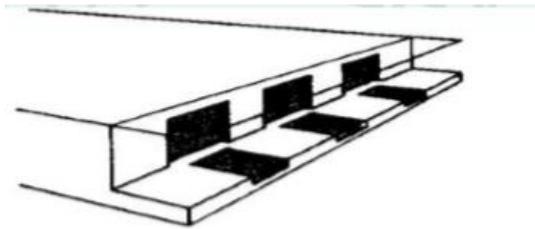
Berdasarkan **Gambar 5**, bahwa dimensi WC yaitu panjang 121,9 cm dan lebar 81,3 cm.



Gambar 5. (Sumber : Panero, Julius) Dimensi Toilet

6. Loading Dock

Fasilitas bongkar pasang sangat berperan penting dalam pasar. Loading dock sebagai ruang servis yang umumnya jauh dengan pengunjung pasar. Ukuran loading dock ini mengikuti lebar mobil angkutan. Ukuran maksimal = 6x3m dan minimal = 5 x 2,5 m



Gambar 6. (Sumber : Panero, Julius) Dimensi Area Bongkar Muat Barang

Prinsip Kebutuhan/Standar Perencanaan dan Standar Perancangan Pasar Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mari Elka Pangestu, 2009) indikator pengelolaan pasar yang berhasil adalah sebagai berikut:

1. Manajemen yang transparan
Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.
2. Keamanan
Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.
3. Sampah
Sampah tidak bertebaran di sembarangan tempat. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di berbagai tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena akan selalu di angkut oleh armada pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir secara berkala.
4. Ketertiban
Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung dan pembeli.
5. Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lainnya.
6. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial
Pasar yang merupakan berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.
7. Produktifitas pasar cukup tinggi
Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal.
 - a. Pukul 05.30 s/d 09.00 aktivitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima khusus makanan sarapan/jajanan pasar.
 - b. Pukul 04.00 s/d 17.00 aktifitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang kios & lapak dan penjualan makanan khas.
 - c. Pukul 06.00 s/d 24.00 aktivitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang ruko.
 - d. Pukul 16.00 s/d 01.00 aktivitas pasar diperuntukkan bagi para pedagang *cafe* tenda.
8. Promosi daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan bagi pelanggan. Daya tarik ini harus dikemas dalam berbagai hal, mulai dari jenis barang dan makanan yang dijual hingga pada berbagai program promosi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pada peraturan ini menjelaskan tentang cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar, pada peraturan ini dijelaskan juga cara pengelolaan pasar tradisional secara fisik dan nonfisik.

Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yaitu:

- a. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi ini meliputi:

 - Mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota
 - Dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
 - Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang dibangun
- b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dari peraturan ini yaitu:
 - Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu
 - Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung segala arah
 - Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
 - Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan
 - Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah
- c. Sarana pendukung pasar yang harus ada sesuai dalam peraturan ini yaitu:
 - Kantor pengelola
 - Areal parkir
 - Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah
 - Air bersih
 - Sanitasi/drainase
 - Tempat ibadah
 - Toilet umum
 - Pos keamanan
 - Tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah
 - Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
 - Penteraan
 - Sarana komunikasi
 - Area bongkar muat dagangan

Perencanaan nonfisik dalam peraturan ini yaitu tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan, standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud antara lain:

- Sistem penarikan retribusi
- Sistem keamanan dan ketertiban
- Sistem kebersihan dan penangan sampah
- Sistem perparkiran
- Sistem pemeliharaan sarana pasar
- Sistem penteraan
- Sistem penanggulangan kebakaran
-

Teori Elemen Kota (Hamid Shirvani, 1985),[1]

1. Land Use

Land Use atau yang lebih sering didengar dengan Tata Guna Lahan merupakan rencana dua dimensi dimana ruang-ruang tiga dimensi akan dibangun dan fungsi-fungsi akan dibentuk. Kebijaksanaan tata guna lahan membentuk hubungan antara sirkulasi/parkir dan kepadatan aktivitas/penggunaan individual.
2. Tata Masa Bangunan (Building Form and Massing)

Building form and massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar massa yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antara massa seperti

ketinggian bangunan, pengaturan massa bangunan dan nilai-nilai harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk teratur, mempunyai garis langit yang dinamis serta menghindari adanya lost space (ruang tidak terpakai). Building form and massing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu:

- Ketinggian Bangunan
 - Kepejalan Bangunan
 - Koefisien Lantai Bangunan
 - Koefisien Dasar Bangunan
 - Garis Sempadan Bangunan
 - Laggam
 - Skala
 - Material
 - Tekstur
 - Warna
3. Sirkulasi dan Parkir
Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, *pedestrian ways*, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan (suatu kegiatan). Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota. Selain itu sirkulasi dapat membentuk karakter suatu daerah aktivitas, dan lain sebagainya.
4. Ruang Terbuka
Secara sistem, ruang terbuka hijau kota pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun. Pada umumnya terdiri dari ruang pergerakan linier atau koridor dan ruang pulau atau oasis. Ruang terbuka terdiri dari *path and room*, sebagai jalur pergerakan dan yang lainnya sebagai tempat istirahat kegiatan atau tujuan. Ruang terbuka di dalam kota dapat berbentuk *man made and natural* yang terjadi akibat teknologi seperti koridor jalan dan pejalan kaki, bangunan tunggal dan majemuk, hutan kota, aliran sungai, dan daerah alamiah yang telah ada sebelumnya. Pada dasarnya ruang terbuka kota merupakan totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai suatu sistem orientasi.
5. Jalur Pedestrian
Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksinya pada elemen-elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan fisik kota di masa mendatang. Perubahan-perubahan rasio penggunaan jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus pejalan kaki dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
- Pendukung aktivitas di sepanjang jalan, adanya sarana komersial seperti toko, restoran, *cafe*.
 - *Street furniture* berupa pohon-pohon, rambu-rambu, lampu, tempat duduk, dan sebagainya.
6. Activity Support
Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung jalur pejalan kaki atau plaza tapi juga pertimbangankan guna dan fungsi elemen kota yang dapat membangkitkan aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, alun-alun, dan sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan desain activity support adalah:

- Adanya koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan binaan yang dirancang.
- Adanya keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan dalam suatu ruang tertentu.
- Bentuk kegiatan memperhatikan aspek kontekstual.
- Pengadaan fasilitas lingkungan.
- Sesuatu yang terukur, menyangkut ukuran, bentuk dan lokasi dan fasilitas yang menampung *activity support* yang bertitik-tolak dari skala manusia.

7. Signage

Penandaan yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penandaan lain. Keberadaan penandaan akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara makro maupun mikro, jika jumlahnya cukup banyak dan memiliki karakter yang berbeda. Sebagai contoh, jika banyak terdapat penandaan dan tidak diatur perletakkannya, maka akan dapat menutupi fasad bangunan di belakangnya. Oleh karena itu, pemasangan penandaan haruslah dapat mampu menjaga keindahan visual bangunan perkotaan. Dalam pemasangan penandaan harus memperhatikan pedoman teknis sebagai berikut:

- Penggunaan penandaan harus merefleksikan karakter kawasan.
- Jarak dan ukuran harus memadai dan diatur sedemikian rupa agar menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan.
- Penggunaan dan keberadaannya harus harmonis dengan bangunan arsitektur di sekitar lokasi.
- Pembatasan penggunaan lampu hias kecuali penggunaan khusus untuk teater dan tempat pertunjukan (tingkat terangnya harus diatur agar tidak mengganggu).
- Pembatasan penandaan yang berukuran besar yang mendominasi di lokasi pemandangan kota.

8. Preservasi

Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan *urban places* (alun-alun, plasa, area perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain:

- Peningkatan nilai lahan
- Peningkatan nilai lingkungan
- Menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial
- Menjaga identitas kawasan perkotaan
- Peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi

Metode

Metode pendekatan ini digunakan untuk mencapai output penelitian yang optimal dan sesuai dengan kebutuhannya.

Metode Pendekatan Teoritis

Metode pendekatan teoritis digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait konsep revitalisasi Pasar Jombang. Berikut merupakan teori terkait kriteria perancangan luas bangunan perdagangan diantaranya :

1. Kriteria Perancangan Pasar Menurut Chiara, Panero & Zelnik

Tabel 2. Kriteria Perancangan dan Design Pasar

Isu	Tujuan	Kriteria
Sirkulasi dan pergerakan orang	Menentukan lebar jalan pengunjung agar nyaman	Lebar sirkulasi minimal 157,4 - 167,6 cm dengan satu orang berjalan dan satu orang sedang

Isu	Tujuan	Kriteria
		melakukan pembelian.
Luas unit lapak	Menentukan tempat penjualan yang layak dan nyaman	Luas lapak minimal 110 cm x 137 cm termasuk meja
Luas unit kios	Menentukan tempat penjualan yang layak dan nyaman	Luas kios minimal 167 cm x 238 cm termasuk meja dan tempat penyimpanan
Luas unit meja <i>foodcourt</i>	Menentukan luasan yang tepat agar nyaman	Luas per-meja dan dua kursi ialah panjang 167 cm dan lebar 61 cm
Luas unit WC	Menentukan luasan yang tepat agar nyaman	Luas satu WC ialah panjang 121,9 cm dan lebar 81,3 cm
Luas Loading Dock	Menentukan area bongkar muat dagangan	Ukuran loading dock mengikuti lebar mobil angkutan. Ukuran Maksimal 6 x 3 m dan minimal 5 x 2.5 m

Sumber : *Time-saver standards for interior design and space planning*

2. Kriteria Perancangan Pasar Aspek Standar Fungsional Menurut Ekomadyo dan Hidayatsyah

Tabel 3. Kriteria Perancangan Pasar Aspek Standar Fungsional Menurut Ekomadyo dan Hidayatsyah

Isu	Tujuan	Kriteria
Tipe dan luas unit kios	Menentukan tipe dan dimensi kios yang ergonomis dan efisien	Kios-kios yang disediakan harus mempunyai tipe dan dimensi yang sesuai dengan karakter komoditas jualan
Efektivitas pemanfaatan ruang	Memperbanyak proporsi luas ruang yang bisa dijual (<i>sellable area</i>)	Luas <i>sellable area</i> seharusnya mencapai 65% dari luas bangunan keseluruhan Jalur sirkulasi seharusnya menggunakan sistem <i>double loaded</i> (melayani dua sisi unit jual)
Lebar jalur sirkulasi	Menentukan lebar jalur sirkulasi yang efisien namun tetap nyaman	Lebar jalur sirkulasi minimal bisa dilewati dua orang dan maksimal 30% dari jumlah lebar unit jual yang diapitnya
Zoning	Menata zona komoditas untuk mengatur alur pengunjung guna meningkatkan aksesibilitas ke semua unit jual	Zona komoditas inti (yang paling dicari pengunjung) diletakkan ditempat paling sulit dijangkau dan berperan sebagai magnet yang menarik pengunjung untuk menghidupkan zona

Isu	Tujuan	Kriteria
		komoditas lainnya
	Mengefisiensikan penyediaan utilitas, terutama jaringan air bersih dan air kotor	Unit-unit jual yang membutuhkan utilitas air bersih dan air kotor harus diletakkan berdekatan
	Memudahkan pengunjung untuk menemukan area berdasarkan komoditas	Zona komoditas tertentu harus diberi penanda tertentu agar memudahkan dikenali pengunjung
Aksesibilitas dan sistem sirkulasi	Menjamin semua unit pasar dapat dijangkau oleh pengunjung	Pintu masuk dan hierarki sirkulasi harus dirancang agar semua area pasar mudah dijangkau
		Zona komoditas inti ditempatkan pada area tertentu agar menarik pengunjung sehingga zona komoditas lainnya hidup
		Unit-unit jual harus mendapatkan aksesibilitas visual yang memadai dari pengunjung
	Memudahkan pengunjung untuk mejangkau lantai-lantai pasar	Lantai-lantai bisa dirancang dengan sistem <i>split level</i> untuk pemeratakan aksesibilitas vertikal
		Eskalator bisa disediakan untuk pasar dengan ketinggian 4 lantai atau lebih
	Memudahkan orientasi pengunjung di dalam pasar	Jalur sirkulasi harus dirancang secara hierarkis
Simpul-simpul sirkulasi harus disediakan pada jalur sirkulasi yang panjang		
Penghawaan	Menciptakan ruang-ruang pasar yang segar dan tidak pengap	Area publik dan sirkulasi harus dirancang dengan memaksimalkan sirkulasi udara silang
		Penghawaan di dalam unit jual bisa menggunakan sirkulasi udara buatan (kipas angin/AC)
Pencahayaannya	Menciptakan ruang-ruang pasar yang terang dan tidak terkesan gelap	Area publik dan sirkulasi harus dirancang dengan optimasi pencahayaan alami
		Pencahayaan di

Isu	Tujuan	Kriteria
		dalam unit jual bisa menggunakan lampu terutama untuk menerangi komoditas yang dikual
Fasilitas umum	Menyediakan fasilitas umum yang mendukung fungsi pasar	Fasilitas umum minimal yang harus disediakan adalah WC, musholla, kantor pengelola, dan ruang serbaguna
		Fasilitas umum lain dapat ditambahkan sesuai karakter pasar setempat
Utilitas air bersih	Menyediakan sarana air bersih yang memadai bagi pedagang komoditas basah	Zona-zona komoditas basah harus diletakkan berdekatan untuk efisiensi utilitas air bersih
		Outlet air bersih harus disediakan di tiap unit daging/ikan, sedangkan untuk komoditas sayur/buah satu outlet air bersih bisa digunakan bersama-sama
Utilitas air kotor	Menciptakan ruang-ruang pasar yang bersih dan tidak becek	Saluran pembuangan air kotor harus disediakan pada zona komoditas basah
		Fasilitas fisik pada zona basah harus dirancang untuk meminimalkan genangan air kotor
Persampahan	Menciptakan pasar yang bersih dari sampah	Tempat penampungan sampah harus disediakan dan ditempatkan terlindung dari aktivitas publik

Sumber: Dokumen Tugas Akhir Perencanaan dan Perancangan Redesain Pasar Sederhana Bandung, Alfansyah (2018)

Metode Pendekatan Normatif

Metode pendekatan normative adalah pendekatan terhadap regulasi maupun NSPK yang terlihat dengan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. NSPK Terkait Penelitian

No	Data Sekunder	Fungsi
1	Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031	Untuk mengetahui peraturan daerah serta jenis pasar yang akan dilakukan kegiatan penataan
	Peraturan Walikota	

No	Data Sekunder	Fungsi
	Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan	Pedoman dalam penentuan revitalisasi kawasan
3	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung pasar yang harus diadakan dalam penataan/perencanaan pasar tradisional.
4	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat	Klasifikasi tingkat kesesuaian pasar rakyat dari kriteria-kriteria yang harus dilengkapi pada kegiatan serta sarana dan prasarana pasar tradisional
5	SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat	Standar nasional untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi acuan dalam perencanaan pasar tradisional
6	Ketetapan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	Standar satuan ruang parkir yang dibutuhkan untuk merancang area lahan parkir
7	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Standar penentuan sarana bangunan WC/MCK sesuai kebutuhan
8	SNI 19-3983-1995 Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Perkotaan di Indonesia	Standar penentuan ruang pengelolaan TPS sesuai kebutuhan
9	Ketetapan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	Standar penentuan ruang gedung parkir sesuai kebutuhan
10	Peraturan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80	Standar analisis <i>Superimpose</i> dalam analisis tapak

Sumber: Studi Literatur

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Komponen Perencanaan Tapak Pasar Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Identifikasi Komponen Perencanaan Tapak Pasar Jombang dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung pasar yang harus dilengkapi sesuai acuan kebijakan yang digunakan. Berikut Tabel 5. **Identifikasi Komponen Perencanaan Tapak Pasar Jombang**

Tabel 5. Identifikasi Komponen Perencanaan Tapak Pasar Jombang

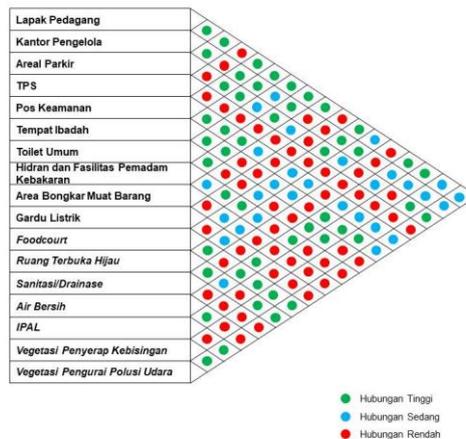
Analisis	Kebutuhan Komponen Perencanaan
Analisis Kebutuhan Komponen Perancangan Pasar Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012	Ruang Dagang/Lapak Pedagang
	Kantor Pengelola
	Areal Parkir
	Tempat Pembuangan Sampah Sementara
	Air Bersih
	Sanitasi/drainase
	Tempat Ibadah
	Toilet umum
	Pos Keamanan
	Tempat Pengelolaan Limbah (IPAL)
	Hidran dan Fasilitas Pemadam Kebakaran
	Sarana Komunikasi
	Area Bongkar Muat Dagangan
	Gardu Listrik
Foodcourt	
Analisis Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pepohonan penyerap kebisingan • Sclupture/Signage
Analisis Arah Angin	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi TPS Pasar Jombang • Vegetasi Pengurai Polusi Udara
Analisis Vegetasi	Area Resapan Air (RTH Kawasan)

Komponen Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar harus mengacu pada aturan yang berlaku, maka dari itu perlu adanya penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pasar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan teori Chiara.

3.2 Analisis Hubungan Fungsional

Analisis hubungan antar komponen merupakan analisis yang dilakukan dengan tujuan mengetahui erat atau tidaknya hubungan yang terjadi secara fungsional antar komponen yang ada pada kawasan perencanaan tapak. Hubungan fungsional akan memudahkan untuk mengatur tata letak atau lokasi dari tiap komponen yang ada. Revitalisasi Pasar Jombang akan memiliki berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pasar untuk menunjang kegiatan masyarakat. Komponen – komponen yang ada akan menimbulkan suatu hubungan antar

komponen yang akan dianalisis pada lokasi perencanaan tapak. Hubungan antar komponen tersebut dapat dilihat pada **Gambar 7. Analisis Hubungan Antar Komponen**



Gambar 7. Analisis Hubungan Fungsional

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa lapak pedagang memiliki hubungan yang tinggi dengan komponen lainnya. Hal tersebut dikarenakan lapak pedagang merupakan fungsi utama dalam kawasan pasar dan merupakan kegiatan utama masyarakat dalam mengunjungi pasar.

3.3 Analisis Tapak

1. Topografi, kemiringan lereng Pasar Jombang yaitu berada di kemiringan lereng 0-2%, sehingga tapak Pasar Jombang ini aman untuk dibangun sebuah bangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
2. Kebisingan, Tapak Pasar Jombang dikelilingi berbagai macam keadaan, di sebelah timur berbatasan dengan jalan lingkungan dan permukiman penduduk, sehingga tingkat kebisingan yang ditimbulkan rendah. Pada bagian utara berbatasan dengan Jalan Tol Jakarta-Serpong yang memiliki sempadan dan sebelah selatan berbatasan dengan bangunan perdagangan dan jasa dimana berdekatan dengan Stasiun Kereta Api Sudimara, sehingga tingkat kebisingan yang ditimbulkan sedang karena ditimbulkan dari suara kendaraan yang melewati jalan tol serta suara kereta api, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kolektor yaitu jalan Jombang Raya yang berarti memiliki kebisingan yang tinggi karena dilewati berbagai macam kendaraan
3. Best View, identifikasi di lapangan bahwa *best view* yang dimiliki Pasar Jombang yaitu menghadap ke arah Jalan Jombang Raya, sedangkan *bad viewnya* menghadap ke permukiman yang berada di belakang Pasar Jombang serta menghadap ke Jalan Tol Jakarta-Serpong. Sehingga pada perancangan Pasar Jombang ke depannya akan dirancang bangunan yang menghadap ke arah Jalan Jombang Raya.
4. Arah Angin, Untuk arah angin di tapak Pasar Jombang lebih dominan angin berhembus dari arah Utara ke Selatan. Angin yang berhembus dari arah Utara lebih kencang daripada angin yang berhembus dari arah Selatan karena di sebelah Utara tidak ada bangunan permukiman sehingga angin mudah untuk berhembus, sedangkan di sebelah Barat, Timur, dan Selatan terdapat bangunan permukiman, perdagangan dan jasa yang beberapa memiliki tinggi lebih dari 1 lantai.
5. Polusi Udara, Di tapak Pasar Jombang terdapat polusi udara yang tinggi, sedang, hingga rendah. Polusi udara tinggi dikarenakan berbatasan dengan Jalan Kolektor yaitu Jalan Jombang Raya yang pada dasarnya memiliki intensitas dilewati oleh kendaraan yang tinggi, sedangkan untuk polusi udara yang sedang berada di sebelah timur dan selatan, polusi udara yang rendah berada di sebelah utara dengan penggunaan lahan berupa sempadan jalan Tol Jakarta-Serpong.
6. Arah Matahari, Bentuk tapak Pasar Jombang lebih dominan memanjang ke arah Utara

dan Selatan. Namun, tidak tegak lurus dengan Utara dan Selatan melainkan sedikit miring ke arah Barat Laut dan Tenggara, sehingga pada bagian belakang dari muka bangunan akan terkena sinar matahari pagi, sedangkan pada bagian muka bangunan akan terkena sinar matahari pada sore hari.

7. Vegetasi, kawasan pasar jombang belum dilengkapinya atau masih kurangnya lahan hijau, hal ini mempengaruhi keasrian dan daerah resapan air pada kawasan pasar jombang.

3.4 Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Jombang

1. Kebutuhan Ruang Lapak Pedagang Pasar Jombang

Pasar Jombang merupakan pasar tradisional yang berada di Jalan Jombang Raya, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pasar Jombang memiliki luas $5600 m^2$.

Tabel 6. Kebutuhan Ruang Lapak Pedagang Pasar Jombang

No	Ruang Dagang	Jumlah Eksisting	Jumlah Rencana	Ukuran Rencana
1	Lapak	200 Unit	209 Unit	2 x 2 m
2	Kios	150 Unit	164 Unit	3 x 2 m

2. Kebutuhan Ruang Kantor Pengelola Pasar Jombang

Dalam penentuan kebutuhan Kantor Pengelola Pasar disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada pada Pasar Jombang

Tabel 7. Kebutuhan Ruang Kantor Pengelola

Kebutuhan Ruang	Jumlah Eksisting	Ukuran Eksisting	Jumlah Rencana	Ukuran Rencana
Ruang Kantor Pengelola	1 unit	45 m ²	1 unit	50 m ²

3. Kebutuhan Ruang Areal Parkir Pasar Jombang

Di dalam Ketetapan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Menyebutkan bahwa setiap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memiliki kewajiban menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap $100 m^2$ per luas lantai penjualan (bangunan yang diperuntukan untuk perdagangan) atau luas lantai efektif.

Tabel 8. Rencana Kebutuhan Ruang Parkir

Jenis Kendaraan	Dimensi SRP (m)	Kebutuhan (SRP)	Rencana (SRP)	Luas (m ²)
Mobil	2,5 x 5	40	165	2.062
Motor	0,75 x 2,0	80	190	285
Truk	6 x 3	2	7	128

4. Kebutuhan Ruang TPS

Timbulan sampah yang terdapat di Pasar Jombang yaitu $1,352 m^3$ /hari. Berdasarkan

peraturan SNI 3242-2008 Pengelolaan Sampah di Permukiman menyebutkan bahwa Klasifikasi TPS Pasar Jombang termasuk ke dalam klasifikasi TPS Tipe I dengan luas lahan $\pm 10-50 m^2$ dengan volume timbulan sampah hingga $100 m^3$

5. Kebutuhan Ruang Ibadah

Dalam perencanaan Kawasan Pasar Jombang, direncanakan sarana peribadatan berupa musholla. Untuk ketentuan sarana ibadah mengacu pada SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan sarana peribadatan untuk ruang peribadatan yang dibutuhkan pada Kawasan Pasar Jombang yaitu sarana musholla dengan luas minimal $45 m^2$ dan maksimal $100 m^2$

6. Kebutuhan Ruang Toilet Umum

Berdasarkan rencana kebutuhan ruang toilet dalam perancangan Pasar Jombang akan direncanakan toilet pria dan wanita dengan ukuran masing – masing $2 \times 1,5 m$.

7. Kebutuhan Hidran dan Fasilitas Pemadam Kebakaran

Dalam rencana sarana dan prasarana pendukung Pasar Jombang akan dilengkapi dengan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Fasilitas pemadam kebakaran yang akan direncanakan yaitu Hidran, Hose-reel, Sprinkle dan Jalur Evakuasi.

8. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan PERDA No. 15 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau untuk kawasan perdagangan dan jasa yaitu minimal 10%, sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau di Pasar Jombang yaitu: $5600 m^2 \times 10\% = 560 m^2$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau di Pasar Jombang yaitu $560 m^2$.

3.5 Hasil Perancangan

Tabel 9. Rencana Tata Guna Lahan Pasar Jombang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (m^2)
1	Pasar Jombang	1.938
2	Area Parkir Basement	
3	Musholla	100
4	Taman	80
3	Pos Keamanan	50
4	Area Bongkar Muat	100
5	Ruang Terbuka Hijau	600
6	Jalan Kawasan Pasar	1.200
7	Pedestrian	1.000
8	Gardu Listrik	50
9	TPS	100
10	Foodcourt	100
Jumlah		5.318



Gambar 8. Peta Rancangan Pasar Jombang



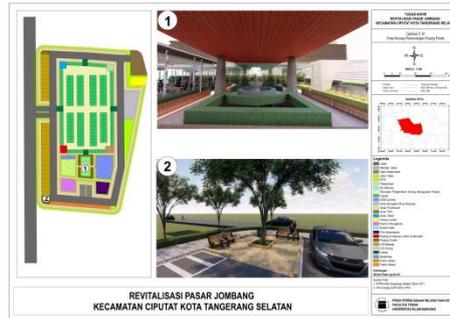
Gambar 9. Peta Rancangan RTH Pasar Jombang



Gambar 10. Peta Konsep Rancangan Bangunan Pasar Jombang



Gambar 11. Peta Konsep Rancangan Parkir Pasar Jombang



Gambar 12. Peta Konsep Rancangan Ruang Publik Pasar Jombang



Gambar 13. Peta Konsep Rancangan Sarana Pendukung Pasar Jombang



Gambar 14. Peta Konsep Rancangan Sarana Pendukung Pasar Jombang

Daftar Pustaka

[1] Chiara D & Callender JH. (1933), *Time Saver Standar*. Hill Book Company, USA
 [2] Hamid Shirvani, dkk. (1985). *The Urban Design Process*.
 [3] Ekomadyo, Agus S. (2019). *SNI Pasar Rakyat Menuju Pasar Juara* (Bimbingan Teknis Untuk Pengelola Pasar Rakyat Jawa Barat)
 [4] Prajawisastra, Alfansyah Fauzy. (2018). *Redesain Pasar Sederhana Bandung (Studi Kasus: Pasar Sederhana Bandung)*. (Tugas Akhir). Bandung: Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi
 [5] Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
 [6] Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031
 [7] Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat
 [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
 [9] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013

Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

[10]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

[11] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga